



Jurnal Bakaba
Volume 6, Nomor 2, Desember, 2017

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Zulfa
Sumber : Jurnal Bakaba, Volume 6, Nomor 2, Juni-Desember 2017
Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Untuk Mengutip Artikel ini :

Zulfa, 2017. *FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI LANDASAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS*. Jurnal. Padang. Jurnal Bakaba, Volume 6, Nomor 2, Desember, 2017: 30-38.

Copyright © 2017, Jurnal Bakaba
ISSN : 2597-9450 (Online)

Laboratorium Prodi Pendidikan Sejarah
STKIP PGRI Sumatera Barat



FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI LANDASAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS

Zulfa¹

Email : zulfaeva75@gmail.com

ABSTRAK

Filsafat pancasila adalah merupakan hal yang paling penting sebagai landasan bernegara yang demokratis. Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Penulisan ini berdasarkan pada studi literatur. filsafat merupakan lapangan utama pemikiran dan penyelidikan manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, filsafat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pendidikan. Ajaran filsafat yang komprehensif telah menghantarkannya menduduki status yang tinggi dalam kehidupan kebudayaan manusia, yakni sebagai ideologi. Bangsa dan negara Indonesia yang telah menyatakan bahwa ideologi dan jatidiri bangsa adalah Pancasila tentu harus merujuk segala sistem dan tatanan kehidupan bangsa kepada Pancasila. Ini telah dibuktikan dengan menuangkannya dalam UUD 1945 dan secara perlahan mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: filsafat pancasila, demokratis, ideologi

ABSTRACT

Pancasila philosophy is the most important thing as the foundation of a democratic state. Pancasila needs to be socialized to be understood by the world as the philosophical foundation of the nation of Indonesia in maintaining its existence and develop it self into a prosperous and modern nation. The writing is based on literature studies. Philosophy is the main field of human thought and investigation. In the life of nation and state, philosophy becomes a reference in carrying out development and education. Comprehensive philosophical teaching has led him to occupy a high status in the life of human culture as an ideology. Nation and state of Indonesia which has declared that ideology and national identity is Pancasila must necessarily refer all system and order of life of nation to Pancasila. This has been proven by putting it into the 1945 law and gradually beginning to apply it in everyday life.

Key word: philosophy Pancasila, democratic, ideology.

PENDAHULUAN

Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang

tingkah laku yang penting dan baik (Muhamad Yamin:1945). Setelah selesai disusun oleh para the founding fathers di tahun 1945, suatu proses lanjut berupa ideologisasi terhadap gagasan-gagasan yang terkandung dalam pancasila belum lagi sempat dilakukan dan dituntaskan.

Perjalanan kehidupan sebagai satu bangsa selama tak kurang dari 72 tahun lamanya, Pancasila telah menghubungkan dan membuat pancasila bangsa ini merasa terikat satu sama lain. Namun „ikatan“ itu terutama adalah lebih karena faktor sejarah, bahwa sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah dicanangkan dan diperkenalkan sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai Dasar Negara yaitu Pancasila yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat, perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih.

Padahal sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila merupakan sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat yang beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu, Indonesia. Dengan hal tersebut dimaksudkan dapat mengartikulasikan sebagai Negara/bangsa yang merdeka,

yaitu: berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dalam hal budaya. oleh karena itu pada era saat ini sangatlah penting untuk melakukan revitalisasi terhadap Pancasila yang bertujuan guna mewujudkan kemandirian bangsa.

Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional, ia harus diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas negara bangsa sendiri. Tentu bentuk perjuangan ideologi pada waktu ini berbeda dengan zaman berbenturannya nasionalisme dengan imperialisme, sosialisme dengan kapitalisme, dan antara demokrasi dengan totaliterianisme. Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Studi literatur ini penulis dapatkan dari berbagai sumber, jurnal, buku-buku yang terkait dengan filsafat pancasila dan demokrasi, internet dan pustaka.

CHASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas dan perekat bangsa Indonesia. Filsafat yang terkandung didalam pancasila harus disoroti dari titik tolak pandangan yang holistic mengenai kenyataan kehidupan bangsa yang beranekaragam. Ini menekankan pada semangat Bhineka Tunggal Ika, semangat ini diharapkan mendasari seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Yaitu adanya kesatuan didalam keaneka ragaman yang ada.

Hal inilah yang disebut dengan Bhineka Tunggal Ika inti dari Filsafat Pancasila. Kerinduan bangsa Indonesia akan

terwujudnya kesatuan didalam pengalaman akan kepelbagaian tersebut merupakan cerminan kerinduan umat manusia sepanjang zaman. Menurut Drijarkara, 1980 Pancasila adalah inheren (melekat) kepada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan yang tertentu pada kongretnya. Sebab itu dengan memandang kodrat manusia "qua valis" (sebagai manusia), juga akan sampai ke Pancasila. Hal ini digambarkan melalui sila-sila dalam Pancasila. Notonagoro, 1984 dalam kaitannya menyebutkan " kalau dilihat dari segi intisarinya, urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang lima sila dianggap maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungannya yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat.

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa (*the founding father*) dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) dan diberi nama Pancasila. Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.

Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai *kausamaterialis* Pancasila.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Berawal dari sidang pleno BPUPKI pertama yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Ketika itu, dr. Radjiman Widyodiningrat dalam pidato pembukaannya selaku ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia. Pertanyaan ini menjadi persoalan paling dominan sepanjang 29 Mei-1 Juni 1945 dan memunculkan sejumlah pembicara yang mengajukan gagasan mereka mengenai dasar filosofis Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1945, secara eksplisit Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang berjudul "Lahirnya Pancasila". Menurut Drs. Mohammad Hatta, pidato tersebut bersifat kompromis dan dapat meneduhkan pertentangan tajam antara pendapat yang mempertahankan Negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler. Perdebatan tersebut pada akhirnya dimenangkan kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, terbukti dengan dikeluarkannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ternyata beberapa rumusan Piagam Jakarta diganti dan menimbulkan kekecewaan umat Islam terhadap pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta dan terus berkembang hingga masa pemerintahan Soeharto, sampai-sampai Carol Gluck mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu banyak

meributkan masalah ideologi dibandingkan negara-negara lain. Melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada tanggal 1 dan 22 Juni, Pancasila yang dirumuskan Panitia Sembilan dan disepakati oleh Sidang Pleno BPUPKI merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Akan tetapi, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam dan Kristen-Katolik dalam hidup bernegara.

Pada era Orde Lama, dinamika perdebatan ideologi paling sering dibicarakan oleh kebanyakan orang. Tampak ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi. Dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948-1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintah pusat. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, atas desakan AH Nasution, selaku Pangkostrad dan kepala staf AD, pada 5 Juli 1959 Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali pada UUD 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia dan pemerintahannya dinamai dengan Demokrasi Terpimpin.

Pada masa Demokrasi Terpimpin pun ternyata tidak semulus yang diharapkan. Periode labil ini justru telah membubarkan partai Islam terbesar, Masyumi, karena dianggap ikut andil dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Bahkan, Soekarno membatasi kekuasaan partai politik yang ada serta mengusulkan agar rakyat menolak partai-partai politik karena mereka menentang konsep musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila. Soekarno juga menganjurkan sebuah konsep yang dikenal dengan NASAKOM yang berarti persatuan antara nasionalisme, agama dan komunisme.

Kepentingan politis dan ideologis yang saling bertentangan menimbulkan struktur politik yang sangat labil sampai pada akhirnya melahirkan peristiwa G 30S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Selanjutnya pada masa Orde Baru, Soeharto berusaha meyakinkan bahwa rezim baru adalah pewaris sah dan konstitusional dari presiden pertama. Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan ini merupakan cara yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Berbagai bentuk perdebatan ternyata tidak semakin membuat stabilitas negara berjalan dengan baik, tetapi justru struktur politik labil yang semakin mengedepan dikarenakan Soeharto seringkali mengulang pernyataan tegas bahwa perjuangan Orde Baru hanyalah untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, yang berarti bahwa tidak boleh ada yang menafsirkan resmi tentang Pancasila kecuali dari pemerintah yang berkuasa.

Pada masa reformasi (setelah rezim Soeharto runtuh), seolah menandai adanya jaman baru bagi perkembangan perpolitikan nasional sebagai anti-tesis dari Orde Baru yang dianggap menindas dengan konfrimitas ideologinya. Pada era ini timbul keinginan untuk membentuk masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan sosial tanpa kooptasi penuh dari negara. Lepas kendalinya masyarakat seolah menjadi fenomena awal dari tragedi besar dan konflik berkepanjangan. Tampaknya era ini mengulang problem perdebatan ideologi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, yang berakhir dengan instabilitas politik dan perekonomian secara mendasar. Berbagai bentuk interpretasi monolitik selama ini cenderung mengaburkan dan menguburkan makna substansial Pancasila dan berakibat pada Pancasila yang menjadi sebuah mitos, selalu dipahami secara politis-ideologis untuk kepentingan kekuasaan serta nilai-nilai dasar Pancasila menjadi nilai yang distopia, bukan sekedar utopia.

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai

dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, atau kenyataan. Estetis, estis maupun religius. Nilai-nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif dan subyektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat obyektif, maksudnya :

1. Rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak
2. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia
3. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri karena, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia.

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (*cultural bond*) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan hari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.

Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga

dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

1. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.
2. Dimensi Idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.
3. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti mendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita -realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Menurut Alfian Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.

4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai kedaan bangsa dan Negara.

Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut biasa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: Kesatuan/Persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa dan personal-personal di dalamnya.

Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dan sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional, Pancasila juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar/asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan sebagai ideologi atau berakhir seperti dalam perkiraan David P. Apter dalam pemikirannya "*The End of Ideology*".

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman dan pengamalan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus

bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaannya tersebut.

Pada akhirnya, semoga seluruh bangsa dan negara Indonesia serta Pancasila sebagai ideologinya akan tetap bertahan dan tidak goyah meskipun dihantam badai globalisasi dan modernisme. Sebagai generasi penerus, marilah kita menjaga Indonesia dan Pancasila agar saling berdampingan dan tetap utuh hingga anak cucu kita nantinya sebagai penerus kelangsungan negara ini.

Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.
2. Lebih memasyarakatkan pancasila.
3. Menerapkan nilai – nilai tersebut dalam kehidupan sehari – hari.
4. Memberikan sanksi kepada pihak – pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pancasila.
5. Menolak dengan tegas faham – faham yang bertentangan dengan pancasila.

Demokratisme

Demokratis Secara etimologi adalah, kata demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan/pemerintahan), dari bahasa Yunani. Dalam sejarah istilah demokrasi telah dikenal sejak abad V SM, yang merupakan respon terhadap pengalaman buruk sistem monarkhi dan kediktatoran di negara-negara kota Athena (Yunani Kuno). Ketika itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem di mana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan jumlah penduduk negara-negara kota. Demokrasi adalah suatu pola dan program bagi seluruh *scope* kehidupan. Demokrasi adalah suatu perwujudan dari pada nilai-nilai fundamental, sikap dan

praktek-prakteknya. Demokrasi juga nilai ideal yang wajib dilaksanakan sepenuhnya dalam semua bidang kehidupan termasuk didalam seni dan keagamaan. Dilihat dari segi ontologi, demokrasi adalah pengalaman dinamis dan interdependensi antara sesama manusia. Karena demokrasi adalah jalan keluar, kanalisasi bagi dorongan-dorongan yang dalam pada setiap pribadi. Seperti *self-respect*, martabat, hasrat bersatu, dan rasa Salah tokoh yang sangat terkenal berbicara tentang demokrasi dan pendidikan adalah John Dewey (1859-1952) seorang pemikir, filsuf dan Pendidik Amerika Serikat yang paling berpengaruh dan sangat terkenal pada masanya. Filsafat instrumentalisme, tulisan dan pengajarannya tidak hanya mempengaruhi secara luas teori dan praktek filsafat pendidikan, tetapi juga psikologi, hukum, dan pengetahuan politik di seluruh dunia. Sidney Hook, salah seorang murid dan sahabatnya, mengatakan bahwa Dewey telah memberikan warisan yang besar dan yang tidak dapat diperhitungkan. Pengalaman jutaan anak-anak Amerika adalah lebih luas dan bahagia terhadap kehidupannya, dan setiap pikiran orang dewasa, Dewey menawarkan sebuah kepercayaan yang masuk akal terhadap kehidupannya, kemudian Dewey juga diterima dan di elu-elukan sebagai Filosof Demokrasi Amerika. Robert B Westbrook, dalam karyanya, mengatakan bahwa John Dewey telah menjadi seorang filosof yang sangat penting dalam sejarah masyarakat Amerika (Saifullah Idris:2016,3) modern, pengabdian, penyerangan dan penghormatan oleh kaum laki-laki dan perempuan diseluruh dunia. Karirnya menjangkau tiga gen modern, pengabdian, penyerangan dan penghormatan oleh kaum laki-laki dan perempuan diseluruh dunia. Karirnya menjangkau tiga generasi pemikiran dan kehidupan masyarakat Amerika, dan pemikirannya di dengar di tengah kontropersial budaya dari tahun 1890-an sampai meninggalnya pada tahun 1952 dalam usia 92 tahun. Dalam karirnya yang lama ini, Dewey telah mengembangkan sebuah filsafat, yang dikenal dengan sebutan *the unity of theory and practice* dan persatuan ini telah menunjukkan karyanya sebagai aktivis politik dan intelektual yang kritis.1. Dalam bidang psikologi, Dewey menganut teori behaviorisme, yang mengemukakan bahwa kehidupan jiwa digerakkan dari luar,

tidak dari dalam, dan tiap perbuatan atau tingkah laku manusia adalah reaksi (response) atas perangsang (stimulus) dari luar. Oleh karena itu, perbuatan yang amat sederhana adalah berupa suatu refleksi. Di samping itu, mazhab ini juga menganggap bahwa perbuatan manusia itu selalu menyesuaikan diri dengan hidupnya yang secara terus menerus menjadi perangsang.

Sedangkan kaitannya dengan pengajaran dalam pandangan Dewey adalah terletak pada cara memberi pengajaran harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan, cara berfikir dan cara bekerja anak. Maka segala sesuatu, dalam hal pengajaran, harus disesuaikan dengan insting anak, yang meliputi insting sosial, insting membentuk atau membangun, insting menyelidiki, dan insting kesenian. Semua insting tersebut dapat dilihat dan ditemukan pada saat anak-anak sedang bermain. Dari segi epistemologi, demokrasi adalah benih dan buah dari pada praktek-praktek intelegensi yang luas. Karena demokrasi merupakan usaha mencari nilai-nilai kebenaran seperti proses ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Dengan kata lain, demokrasi adalah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang dilaksanakan di dalam pergaulan sosial. Dalam arti yang ideal, demokrasi merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan, nilai individual, dan sekaligus nilai Sosial. Selain itu, dalam bidang pengetahuan politik. Menurut Samuel P. Huntington, ada dua sebab umum yang benar-benar menonjol dalam menambah jumlah rezim demokratis di dunia ini. *Pertama*, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan pertumbuhan kelas borjuis. *Kedua*, penyebarluasan gagasan-gagasan Barat dan ekspansi kekuatannya (kolonialisme) pada masyarakat lain. Demokrasi pendidikan adalah adanya kesempatan dalam pendidikan harus disediakan, dan tidak ada diskriminasi dalam masyarakat demokrasi. Demokrasi secara literal adalah "*rule by the people*". Kehidupan modern berarti demokrasi, demokrasi artinya membebaskan intelegensi secara efektif dan independen, untuk membebaskan pikiran sebagai sebuah organisme yang bersifat individu yang gunanya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Secara alami mengasosiasikan demokrasi dengan

kebebasan bertindak, tetapi kebebasan bertindak tanpa membebaskan kemampuan dan kapasitas berfikir hanya sebuah kekacauan. Tidak dapat dielakkan bahwa demokrasi membawa respek yang banyak pada individu sebagai individu, yang mempunyai kesempatan yang banyak untuk kebebasan, punya inisiatif dalam bertindak dan berfikir, tidak membebaskan diri sendiri dan melahirkan tanggung jawab-tanggung jawab. Dewey menekankan bahwa demokrasi sebagai *a way of life* juga memerlukan sebuah keyakinan pada kemampuan sifat alami manusia, seperti intelegensi, dan kekuatan yang disatukan, seperti pengalaman bekerja sama. Rintangan-rintangan untuk merealisasi *way of life* demokrasi itu ada dalam institusi-institusi dan sikap-sikap/tingkah laku-tingkah laku kita sendiri. Dewey menulis tentang berjuang untuk demokrasi.

Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam laku adil sejak dalam merumuskan kebijakan, menjunjung tinggi hukum, solidaritas politik nirkorupsi, serta obsesi keadilan dan kesejahteraan bersama. Hukum tidak tertulis dalam bentuk simbol biasanya mudah ditemukan pada masyarakat adat. Misalnya tanda sasi yang dibuat dengan janur kuning yang melambangkan larangan atau pembolean untuk memanfaatkan sumber daya alam tertentu. Menegakkan kembali Pancasila seharusnya dengan cara yang sesuai dengan Pancasila. Banyak orang ingin menuju perdamaian melalui perang, padahal mencari damai harus melalui jalan damai. Untuk perdamaian kita harus siap untuk berdamai. Begitu pula untuk membela dan menegakkan Pancasila haruslah dengan sila-silanya sendiri.

Membela Pancasila dengan jalan menegakkan hukum harus didasari dari hati dan perasaan takut kepada Tuhan. Menegakkan hukum harus dengan berlaku jujur dalam praktek demokrasi, adil dalam perwakilan berdasarkan jumlah suara (jiwa), memberi kesempatan berbeda pendapat, dan peluang untuk penggantian kepemimpinan secara berkala, menentukan alokasi sumber daya (anggaran) oleh wakil-wakil yang bertanggung jawab dan tidak didikte dari atas atau oleh pikiran pragmatis sesaat, dan dengan pertanggung jawaban yang pantas kepada yang memilih. Menegakkan kembali Pancasila harus dengan menjauhi

kolonialisme internal, berdiri di atas keadilan dalam mengelola sumber daya alam, di atas hukum yang melindungi.

D. KESIMPULAN

Filsafat adalah ratu ilmu pengetahuan (Queen of Knowledge) karena filsafat dipandang sebagai induk ilmu pengetahuan atau yang melahirkan ilmu pengetahuan. Artinya sebelum ada ilmu pengetahuan, filsafat merupakan lapangan utama pemikiran dan penyelidikan manusia. Kesimpulan-kesimpulan filsafat bersifat hakiki sehingga menyebabkan kedudukan filsafat dianggap lebih tinggi dari ilmu pengetahuan yang lain.

Oleh sebab itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, filsafat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pendidikan. Ajaran filsafat yang komprehensif lah yang telah menghantarkannya menduduki status yang tinggi dalam kehidupan kebudayaan manusia, yakni sebagai ideology. Bangsa dan negara Indonesia yang telah menyatakan bahwa ideology dan jatidiri bangsa adalah Pancasila tentulah harus merujuk segala sistem dan tatanan kehidupan bangsa kepada Pancasila. Ini telah dibuktikan dengan menuangkannya dalam UUD 1945 dan secara perlahan mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin.2007. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Prosfect
- Assegaf, Abd. Rachman. 2005. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Aziz Mashuri A. 1989. *Pokok Pikiran Pengembangan Pengkajian Kitab*: Jakarta: majalah Tebuireng
- Darma Putra, Eka, PH.D, 1988. *Pancasila, Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.

- Edward de Bono. 2000. *Pemikiran Baru Era Milenium*, Penerbit Elex Kompatindo.
- H.A.R.Tilaar. 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional menyongsong Abad XXI*, Balai Pustaka.
- J. C. van leur. 1960. *Indonesia Trade and Society*. Bandung : Sumur Bandung
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2009. *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Lim, Francis. 2008. *"Filsafat Teknologi Don Ihde Tentang Dunia, Manusia, dan Alat"* Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Lubis, Mochtar. 1977. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta : Idayu Press.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter: Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Tanpa Tempat: Indonesia
- Moesoko, Somarsono. 1986. *Sejarah Pendidikan dari Zaman Kezaman*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muh. Said dan Junima Affan. 1987. *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Jemmars
- Muhammad Said dan Junimar Affan. 1987. *Mendidik dari Zaman Ke Zaman*. Bandung: Jemmars.
- Mulder, Niels, 1996. *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*, Amsterdam/Kuala Lumpur: The Pepin Press
- Najamuddin. 2005. *Perjalanan Pendidikan Di Tanah Air (Tahun 1800-1*
- Noor Syam, Moh, 1986. *Filsafat Pendidikan dan dasar filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya : Usaha Nasional
- Poedjawisatria, 1997. *Pembimbing kearah alam Filsafat*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prasodjo, Imam. 2008. *"Merajut Kembali Indonesia yang Tercabik"* dalam Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, eds. *Reinventing Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Ricklefs, M.C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta :PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Saifullah Idris, (2014), *Demokrasi dan Filsafat Pendidikan*, Banda Aceh, Ar-Raniri.
- Supriadi, Dedi (Ed.). 2003. *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangan Sejak Zaman Kolonial hingga Era Reformasi*. Jakarta: Depdikbud.
- Surachmad, Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional: Srtategi dan Tragedi*, Penerbit Kompas.
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta :Ar-Ruzz Media